

## DAMPAK FATWA DSN-MUI TERHADAP SISTEM KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA

Irzan<sup>1\*</sup>, Fiona Gea Az-Zahra<sup>2</sup>, Alda Lorenza<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

<sup>1</sup>[erzansaputrainawan@gmail.com](mailto:erzansaputrainawan@gmail.com), <sup>2</sup> [fionageaazzahraa@gmail.com](mailto:fionageaazzahraa@gmail.com),

<sup>3</sup>[aldalorenza072@gmail.com](mailto:aldalorenza072@gmail.com)

Received: 07-07-2025

Revised: 28-07-2025

Approved: 20-08-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam membentuk produk, layanan, serta praktik keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan meninjau 30 artikel ilmiah terindeks SINTA yang relevan, kemudian diseleksi menjadi 7 artikel utama untuk dianalisis lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan penting sebagai pedoman normatif sekaligus pendorong inovasi dalam industri keuangan syariah, mencakup pengembangan produk perbankan, pasar modal, sukuk, asuransi syariah, hingga layanan digital berbasis syariah. Selain itu, fatwa ini memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun fatwa DSN-MUI bukan hukum positif yang mengikat, dalam praktiknya ia memiliki kekuatan efektif dalam mengatur keberlanjutan, kepatuhan, serta pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Fatwa DSN-MUI, Keuangan Syariah, SLR, Kepatuhan Syariah, Inovasi Keuangan

### PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syari'ah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi (Lubis et al. 2024). Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan sistem keuangan syari'ah adalah peran fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman utama yang memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya (Rahmatika and Yustati 2024).

Fatwa DSN-MUI tidak hanya memberikan kepastian hukum dan arah bagi pengembangan produk keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih patuh dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah di Indonesia (Rahmatika and Yustati 2024). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memiliki peran strategis dalam pengawasan operasional lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan, sehingga memperkuat posisi fatwa dalam sistem hukum nasional (Aliyah 2023). Meskipun fatwa DSN-MUI menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah, terdapat permasalahan yang belum sepenuhnya terjawab terkait sejauh mana fatwa tersebut benar-benar mempengaruhi produk, layanan, dan praktik keuangan syariah secara nyata di lapangan. Beberapa lembaga keuangan syariah terkadang masih menghadapi

kesulitan dalam mengimplementasikan fatwa secara konsisten, sehingga muncul perbedaan interpretasi dan praktik yang dapat mengurangi efektivitas fatwa sebagai pedoman syariah. Selain itu, belum ada gambaran yang komprehensif mengenai dampak fatwa ini terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan, khususnya dalam konteks dinamika pasar dan regulasi nasional yang terus berkembang. Namun, implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan dalam penerapan prinsip syariah pada produk tertentu dan kompleksitas pengawasan yang melibatkan berbagai otoritas. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai dampak fatwa DSN-MUI terhadap sistem keuangan syaria'ah di Indonesia sangat penting untuk memahami efektivitas fatwa tersebut dalam mendorong kepatuhan syariah, meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya (Lubis et al. 2024).

## METODE PENELITIAN



**Gambar 2.** Tahapan penelitian

Gambar 1 Menunjukkan diagram alur pada penelitian ini, dimana penelitian ini dimulai dengan penentuan topik yaitu dampak fatwa dsn-mui terhadap sistem keuangan syaria'ah di indonesia. Setelah menemukan topik yang ingin dibahas, maka dilanjutkan dengan pencarian literatur terhadap beberapa jurnal yang relevan dengan topik yang dipilih. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi dan penilaian jurnal, guna menemukan jurnal terbaik yang digunakan dalam mendukung penelitian ini. Selanjutnya penulis melakukan analisis dan sintesis data dari jurnal yang telah diseleksi untuk mendapatkan jawaban berupa metode terbaik. Tahapan terakhir dalam penelitian ini yaitu penyusunan pelaporan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literature sistematik(SLR). Tinjauan literatur sistematis adalah istilah yang mengacu pada metodologi penelitian atau penelitian dan pengembangan spesifik yang dilakukan untuk mengumpulkan dan

mengevaluasi temuan penelitian pada topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia, tinjauan literatur sistematis adalah metode tinjauan literatur yang mengidentifikasi, menyelidiki, mengevaluasi, dan menafsirkan semua hasil penelitian yang ada. Dengan menggunakan metode ini, peneliti melakukan review dan mengidentifikasi jurnal secara terstruktur mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dalam setiap proses. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti mengumpulkan 30 artikel sebanyak artikel yang telah terpublikasi serta terindeks di Science and Technology Index(SINTA). Apabila jurnal penelitian terdahulu telah sesuai dengan kualifikasi maka akan lakukan pengumpulan serta dibuat sebuah ringkasan yang mencerminkan hasil penelitian tersebut dengan format yang berbentuk tabel dan mencakup nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama tempat terbit jurnal, dan hasil atau berupa kesimpulan jurnal. Setelah peneliti membuat ringkasan penelitian, kemudian penelitian mempelajari dan membandingkan jurnal-jurnal lain untuk mengetahui hasil dari Dampak Fatwa DSN-MUI terhadap Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Selanjutnya, mereka mengumpulkan data tentang variabel yang relevan dan membuat kesimpulan dari jurnal-jurnal sebelumnya.

**Tabel 1.**  
**Hasil Penelitian Literatur**

No	Peneliti Dan Tahun Terbit	Judul	Hasil
1	MuhamadIzazi Nurjaman, Dena ayu, 2021	Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap Keberlangsungan operasional bisnis di lembaga Keuangan syariah	DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Hal itu, diperkuat dengan lahirnya kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan landasan formal yang memiliki kekuatan mengikat bagi parapelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan umumnya lembaga non-bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi. Artinya setiap produk perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal itu sebagaimana nilai dan moralitas serta keinginan dari para pelaku aktivitas ekonomi syariah. Karena merekalah yang mejalankan system operasional lembaga keuangan syariah. Sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola lembaga keuangan syariah yang sistem operasional bisnis maupun produk yang ditawarkannya harus sesuai dengan ketentuan syariah.
2	Ahmad Rifai , Muhammad Rafi Siregar Iwan Setiawan,	Hakikat Hukum Dan Dampak Sosial Dari Fatwa Dsn Mui Tentang Pasar Modal	pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan lembaga keuangan bukan bank sebagai sumber pembiayaan bagi pengembangan dan perluasan

2022	Syariah	usaha. Acara ini terutama untuk perusahaan yang membutuhkan banyak modal dan menggunakannya untuk waktu yang lama. 12 Pihak yang membutuhkan modal cepat dan dalam jumlah besar umumnya lebih berharap dan sangat membutuhkan modal dari investor, atau tidak perlu menunggu lama modal dari operasional perusahaan. Dengan demikian, fungsi keuangan juga dapat dilihat pada fungsi dan peran pasar modal itu sendiri dalam menyediakan dana investor untuk disalurkan oleh anggota sektor defisit. Investor tidak harus ikut serta secara langsung dalam kepemilikan aset riil yang dipersyaratkan oleh emiten saat memberikan dana kepada emiten.
3 Jamaluddin, 2022	Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma') Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014	Pembiayaan sindikasi syariah mengandung banyak manfaat, utamanya menjadi salah satu strategi perbankan syariah untuk mendongkrak aset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan pembiayaan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Hasil dari pembiayaan sindikasi ke korporasi akan dinikmati oleh semua pihak terutama masyarakat pemilik modal dana dalam bentuk bagi hasil keuntungan dan jasa.
4 Soleh Hasan Wahid, 2019	Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI	Berdasarkan analisis di atas penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, <i>pertama</i> , Fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai jawaban atas pertanyaan yang memiliki kaitan dengan hukum agama tetapi juga merupakan respon aktif dari DSN-MUI dalam menanggapi permasalahan ekonomi Syariah. <i>Kedua</i> , Pada umumnya <i>mufti</i> berhak memberikan fatwa tentang persoalan kehidupan meliputi <i>aqidah</i> , <i>'ibadah</i> , <i>akhlāq</i> , dan <i>mu'amalah</i> . Akan tetapi, DSN-MUI hanya berwenang memberikan fatwa khusus dalam bidang ekonomi syariah saja.
5 Muflihul Fadhil, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, Nurul Huda,	Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Kasus Wanprestasi Nasabah Pada Bisnis Syariah di Indonesia	Peran utama fatwa ini adalah dapat membimbing Penyelesaian dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSNMUI memastikan bahwa penyelesaian wanprestasi berpegang pada prinsip keadilan dan

---

2024	transparansi, tanpa melibatkan unsur <i>riba</i> , <i>gharar</i> (ketidakpastian), atau <i>zalim</i> (merugikan salah satu pihak) dan memberikan Aturan Ta'widh (Ganti Rugi) . Fatwa DSN MUI memperbolehkan <i>ta'widh</i> sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian nyata akibat wanprestasi. Ini berbeda dari denda yang biasanya bertujuan untuk menghukum atau mendapatkan keuntungan tambahan, sehingga ta'widh lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong Kepatuhan Akad dalam Bisnis Syariah. Dengan adanya fatwa ini, pihak-pihak dalam akad diharapkan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, sehingga akad yang dilakukan terlaksana dengan amanah dan tidak merugikan salah satu pihak.
6. Awaluddin, Andis Febrian,2020  Kedudukan Fatwa Dsn- Mui Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia	Kedudukan Fatwa DSN–MUI dalam perspektif hukum perbankan syariah di Indonesia terlihat dengan Adanya traspormasi fatwa kedalam aturan perundang-undangan, sebagai bagian dalam peningkatan peran dan kedudukan fatwa di setiap transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah. Kedudukan fatwa dapat juga terlihat pada rujukan pengawasan lembaga keuangan syariah oleh dewan pengawas syariah yang sudah difatwakan oleh DSN untuk peningkatan pengwasan pada aspek syariah di setiap transaksi keuangan di lembaga pada lembaga keuangan syariah. Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi kedalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan.

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil data penelitian yang di masukkan dalam kajian literature ini adalah analisis dan inti pembahasan dari artikel yang berkaitan dengan Dampak Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *Berdasarkan kajian literatur di atas*

*telah dilakukan penelitian terhadap 7 artikel yang membahas mengenai Dampak Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia.*

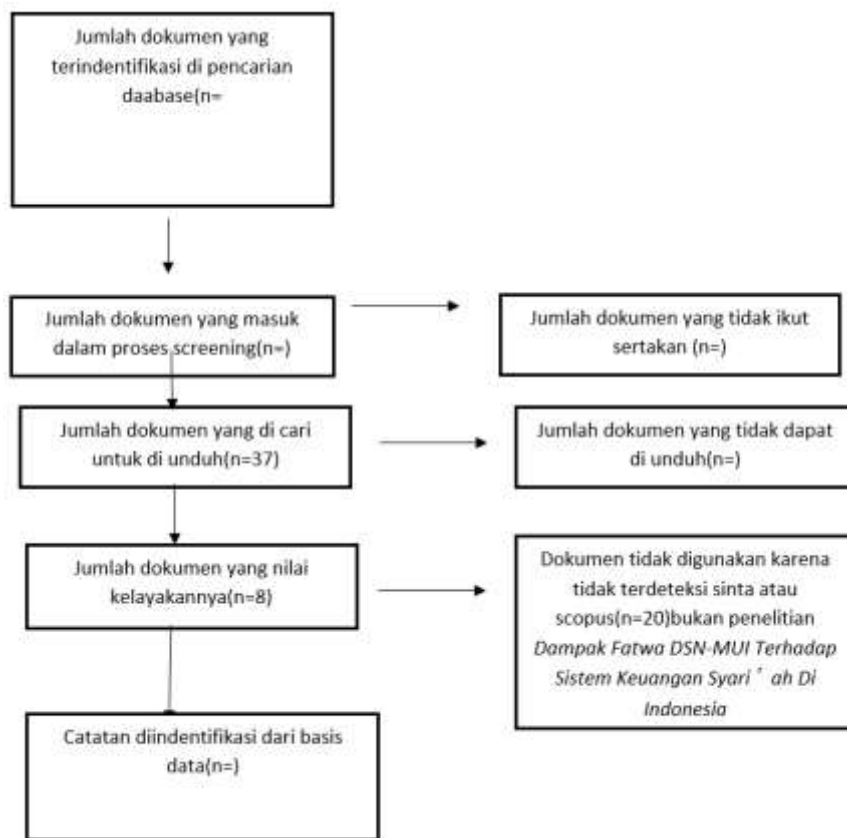
### **Fatwa DSN MUI**

Fatwa adalah pendapat yang dibuat oleh seorang alim dan tidak termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam. Fatwa tidak mengikat, jadi mereka dapat diikuti atau ditolak (Hardi 2019). Adapun yang dimaksud adalah keputusan atau nasihat resmi yang diberikan oleh sebuah lembaga atau individu yang memiliki otoritas yang diakui, yang disampaikan oleh seorang mufti atau ulama. Ini diberikan sebagai tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak memiliki ikatan. Dalam kehidupan beragama Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) digunakan sebagai keputusan tentang masalah ijthâdiyah yang terjadi di negara ini untuk digunakan sebagai pegangan (Awaluddin and Febrian 2020). Fatwa memiliki kedudukan yang penting dalam struktur hukum Islam karena sebagai penjelasan serta princi terhadap ketentuan-ketentuan syariah. Fatwa berfungsi untuk memberikan serta merujuk pada nash, yaitu al-Quran dan hadis, sebagai sumber hukum. Setiap muslim berkewajiban untuk menaati perintah dan menjauhi larangan yang termuat dalam nash, oleh karena itu, ketika fatwa disusun berdasarkan pemahaman terhadap nash, maka mengikuti fatwa secara tidak langsung dapat diartikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran yang bersumber itu sendiri. Dengan demikian umat Islam diharapkan untuk menjunjung tinggi dan menjalankan ketentuan fatwa sebagai bagian dari komitmen terhadap ajaran Islam (Nurjaman and Ayu 2021).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) digunakan sebagai otoritas dalam perbankan syariah. Ini berarti bahwa setiap produk keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi lembaga keuangan Islam, prinsip moral dan aspirasi mereka yang terlibat dalam aktivitas ekonomi jahat adalah sama. Akibatnya, mereka dikenakan tanggung jawab yang signifikan untuk menjalankan lembaga keuangan Islam dan memastikan bahwa produk yang mereka jual sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, DSN-MUI bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan penilaian sesuai produk dengan syariah (Aliyah 2023). Salah satu contoh nyata pengaruh fatwa DSN-MUI adalah pengembangan produk sukuk dan saham syariah yang kini menjadi instrumen investasi populer di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum dan syariah yang menjadi landasan bagi penerbitan sukuk dan pengelolaan saham syariah. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas akses pembiayaan syariah di sektor riil. Selain itu, fatwa DSN-MUI juga mendorong pengembangan produk pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip bagi hasil, sehingga memperkaya variasi produk pembiayaan syariah di perbankan (Rahmatika and Yustati 2024)

Fatwa DSN-MUI juga berkontribusi pada inovasi di sektor asuransi syariah (takaful), di mana fatwa memberikan pedoman operasional dan produk yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama (tabarru'). Dukungan fatwa ini membantu lembaga asuransi syariah untuk mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga menarik bagi masyarakat luas. Promosi dan edukasi yang dilakukan oleh MUI terkait fatwa produk asuransi syariah terbukti meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam asuransi syariah, sehingga memperkuat posisi industri ini dalam sistem keuangan nasional (Arsela, Zen,

and Fatmawati 2025). Lebih jauh, fatwa DSN-MUI juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, misalnya dalam pengembangan produk keuangan digital dan marketplace syariah. Fatwa ini memberikan kerangka syariah yang jelas bagi transaksi digital sehingga memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis teknologi. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai pendorong inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Pramudita, Febrian, and Iqbal 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Aliyah 2023) mendapatkan kesimpulan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kelangsungan dan operasional bisnis lembaga keuangan syariah serta pemenuhan kebutuhan nasabah.



**Gambar 1.** Cantalioknkkjnn dari studi melalui database dan recaster

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang berfokus pada Dampak Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Keuangan Syari’ah Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI memainkan peran sentral dalam membentuk produk, layanan, dan praktik keuangan syariah di Indonesia dengan memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjadi pedoman wajib yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk dan layanan yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar namun juga patuh pada ketentuan syariah, seperti penghindaran riba dan penerapan sistem bagi hasil. Dampak

dari penerapan fatwa DSN-MUI ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun fatwa ini bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum positif, dalam praktiknya fatwa DSN-MUI efektif menjadi landasan operasional yang mengatur keberlanjutan dan legitimasi produk, sehingga mendorong kematangan dan inovasi dalam industri keuangan syariah di tanah air. Namun, penerapan fatwa ini juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan penguatan pengawasan dan peningkatan pemahaman agar kepatuhan syariah terjaga secara konsisten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliyah, Alfiina Rohmatil. 2023. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3(2):189–204. doi: 10.54437/irsyaduna.v3i2.1035.
- Arsela, Mika, Muhamad Zen, and Fatmawati. 2025. "Promosi Produk Asuransi Syari' Ah Sebagai Instrumen Keuangan Islami : Pada MUI Dan Dampaknya Terhadap Umat." 5.
- Awaluddin, and Andis Febrian. 2020. "Kedudukan Fatwa Dsn-Mui Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 06(0):196–209.
- Hardi, Eja Armaz. 2019. "Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1):82–105. doi: 10.21274/an.2019.6.1.82-105.
- Lubis, Rahmad, Atmo Prawiro, Universitas Islam, and Negeri Syarif. 2024. "Peran Fatwa Dsn Mui Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah : Perspektif Hukum Ekonomi Islam." 4(2):227–40. Doi: 10.55252/Annawawi.V4i2.69.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Dena Ayu. 2021. "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9(2):55–67. doi: 10.37812/aliqtishod.v9i2.245.
- Pramudita, Amanda, Silvani Febrian, and Muhammad Nur Iqbal. 2025. "The Role Of The National Sharia Council Fatwa In The Development Of The Sharia Financial Industry In Indonesia." 15(02):201–11. doi: 10.58471/justi.v15i02.
- Rahmatika, Chairunisa Indri, and Herlina Yustati. 2024. "Analisis Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." 2(4).